

pendidikan terkait, tidak hanya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal (Purwandari dan Purwati, 2008).

Pendidikan karakter dianggap sangat penting dan harus segera diterapkan pada sistem pendidikan nasional untuk membangun karakter bangsa yang bermoral. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang menekankan pentingnya pendidikan karakter. Sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa maka pendidikan karakter mendesak untuk diterapkan. Hal tersebut disampaikan Mendiknas pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) di Jakarta pada hari Minggu, 2 Mei 2010 (Media Center Diknas, 2010. Diakses pada 31 Desember 2010 dari <http://www.penapendidikan.com/mendiknas-pendidikan-karakter-mendesak-diterapkan.html>). Penerapan pendidikan karakter diharapkan akan menciptakan pendidikan ideal untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang baik.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Salah satu nilai yang penting dan hampir hilang adalah kejujuran baik dalam perkataan maupun perbuatan (Tentang Pendidikan Karakter. Diakses pada 31 Desember 2010 dari <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/>). Nilai-nilai tersebut seharusnya

dimiliki oleh setiap pelaku pendidikan baik guru, siswa, pejabat terkait dan yang terpenting adalah orang tua sebagai pendidik utama di dalam keluarga.

Karakter merupakan struktur antropologis manusia. Di sanalah manusia menghayati kebebasannya dan mengatasi keterbatasan dirinya. Oleh karena itu karakter lebih bersifat subyektif sehingga ketika berhadapan dengan orang lain, manusia mengukuhkan keunikannya sebagai bagian dari cara menghayati kebebasan dan mengatasi keterbatasan dirinya. Sementara pendidikan erat kaitannya dengan dimensi sosial manusia atau sebagai bantuan sosial. Maka pendidikan karakter merupakan bantuan sosial agar individu dapat hidup dalam kebebasannya bersama orang lain di dunia (Koesoema, 2007).

Beberapa aspek moral penting dalam pribadi akan hilang selama proses pendidikan akibat efisiensi dan efektifitas yang dijadikan tolak ukur keberhasilan. Salah satu aspek moral penting tersebut adalah kejujuran baik dari guru maupun siswa (Koesoema, 2007). Kejujuran yang hilang dapat dilihat ketika ada siswa yang mencontek saat ujian berlangsung atau guru yang membocorkan jawaban Ujian Nasional dengan tujuan agar anak didiknya dapat lulus semua karena tuntutan nama baik sekolah yang harus dipertahankan.

Dewasa ini tantangan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan tangguh semakin berat. Pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang mutakhir, namun juga harus mampu membantu dan membentuk sistem keyakinan dan karakter yang kuat

setiap peserta didik sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya. Pendidikan di sekolah tidak lagi cukup hanya dengan mengajar anak agar bisa menulis, membaca dan berhitung, kemudian lulus ujian dan nantinya mendapatkan pekerjaan yang baik. Sekolah juga perlu membantu orang tua untuk menemukan tujuan hidup anak (Hidayatullah, 2010). Sekolah harus mampu mendidik anak agar mampu memutuskan apa yang benar dan salah. Tidak hanya memberi pemahaman tentang nilai yang harus dimiliki akan tetapi anak didik harus pula mampu menghayati dengan perasaannya sehingga kemudian dia mampu mengaplikasikan nilai tersebut di dalam kehidupannya.

Sekolah mengalami dilema ketika harus meluluskan semua siswanya karena jika tidak diluluskan, nama baik sekolah menjadi taruhannya. Para guru lebih mengkhawatirkan prosedur dan aturan pemerintah dari pada menanamkan kejujuran kepada siswa. Guru ketakutan dengan banyaknya aturan yang harus dipenuhi, seperti batas nilai minimal. Akibatnya tidak jarang nilai akhir justru tidak sesuai dengan kemampuan siswa (Jawa Pos, 13 Maret 2011, hal 43).

Salah satu bentuk dari pendidikan karakter adalah didirikannya kantin kejujuran yang dimulai sejak tahun 2007 sebagai sarana mengaplikasikan perilaku jujur (Kantin Kejujuran Masih Eksis. Diakses pada 9 Pebruari 2011 dari <http://www.majalaheducare.com/focus/kantin-kejujuran-masih-eksis>). Kantin kejujuran merupakan kantin yang menyediakan berbagai makanan dan minuman tanpa adanya penjual. Para pembeli di kantin ini mengambil sendiri

barang yang dibeli, begitu pula ketika membayar dan mengambil uang kembali juga dilakukan sendiri.

Di Indonesia banyak sekali sekolah yang memiliki kantin kejujuran, jumlahnya sudah ada 1.000 lebih, namun sayangnya dari 1.000 kantin kejujuran yang bisa bertahan hanya 20% saja sedangkan yang 80% dapat dipastikan tutup karena merugi. Hal ini sangat disayangkan karena dengan banyaknya kantin yang tutup maka sangat terlihat jika moral anak-anak belum terdidik dengan baik semenjak kecil. Oleh karena itu, gagasan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan KPK untuk memasukkan kurikulum antikorupsi ke dalam pelajaran sekolah tentu patut diapresiasi dan disambut positif (Portal Pendidikan Indonesia. Diakses pada 24 Pebruari 2011 dari <http://diksia.com/kantin-kejujuran-praktek-pendidikan-antikorupsi>).

Dari beberapa kantin kejujuran di SMP dan SMA di Surabaya, terdapat kantin yang masih untung, bertahan meski rugi bahkan ada yang tutup. Penyebabnya antara lain karena: 1) terdapat siswa yang mengambil uang penjualan; 2) siswa tidak membayar setelah mengambil makanan; 3) siswa berhutang kemudian lupa atau melupakan untuk membayar dan 4) terkadang pihak pengelola kantin tidak siap uang kembalian (Jawa Pos, 15 Maret 2011, hal. 31). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejujuran yang diharapkan belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Fenomena yang serupa juga dijumpai di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Di sekolah ini telah didirikan kantin kejujuran sejak tahun 2008. Pada awalnya,

Imam Ghazali (dalam Arifin, 2011) menganggap karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap dan berbuat yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Jika spontanitas tersebut melahirkan perbuatan baik maka menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak atau karakter yang terpuji. Sedangkan jika perbuatan buruk yang dihasilkan, maka disebut akhlak atau karakter tercela.

Menurut Hornoby dan Parnwell (dalam Hidayatullah, 2010), karakter sebagai kualitas mental atau moral. Sedangkan di dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, dalam Hidayatullah, 2010).

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain.

Dengan demikian, dapat dikemukakan juga bahwa karakter dalam pendidikan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti dari nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan dalam proses pendidikan yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada peserta didik. Adapun uraian tentang pengertian pendidikan karakter adalah sebagai berikut.

Pendidikan karakter pertama kali dicetuskan oleh FW Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter menekankan dimensi etis spiritual dalam proses pembentukan pribadi. Pendidikan karakter muncul sebagai reaksi atas kemujudan pedagogi natural Reousseau dan instrumentalisme pedagogis Dewey. Bagi Foerster, karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasikan seorang pribadi. Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Kualitas seorang pribadi dapat diukur dengan kematangan karakter yang dimilikinya (Koesoema, 2007 dan Elmubarok,2009).

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi *insan kamil*. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan termasuk komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penelitian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah (Tentang Pendidikan Karakter. Diakses pada tanggal 31 Desember 2010 dari <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/>).

untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu: 1) *conscience*; 2) *self-esteem*; 3) *empathy*; 4) *loving the good*; 5) *self-control* dan 6) *humility*; c) *Moral action* atau perbuatan moral. Terdapat tiga aspek karakter yaitu: 1) *competence*; 2) *will* dan 3) *habit*.

Terdapat enam jenis karakter yang menjadi acuan dalam pendidikan karakter yang disebut *The Six Pillars of Character* yang dikeluarkan oleh *Character Counts Coalition (a project of The Joseph Institute of Ethics)*. Enam pilar tersebut adalah: a) *trustworthiness*, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur dan loyal; b) *fairness*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain; c) *caring*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar; d) *respect*, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain; e) *citizenship*, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam dan f) *responsibility*, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin (Chrisiana, 2005).

Ratna Megawangi (dalam Elmubarok, 2009) mengemukakan sembilan pilar karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yaitu: a) cinta Tuhan, kebenaran dan segenap ciptaan-Nya; b) tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian; c) amanah, kejujuran dan diplomasi;

landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan; b) menumbuhkan atau menanamkan kecerdasan emosi dan spiritual yang mewarnai aktivitas hidupnya; c) menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran d) menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif secara teratur dalam aktivitas hidupnya dan memahami manfaat dari keterlibatannya; e) menumbuhkan kebiasaan untuk memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan aktivitas belajar dan f) menumbuhkan pola hidup sehat dan pemeliharaan kebugaran jasmani.

Sedangkan tujuan pendidikan karakter (Megawangi, 2007) adalah untuk membentuk anak-anak dengan karakteristik sebagai berikut: a) membangun dan membentuk karakter anak yang mempunyai intelektualitas dan kematangan emosi yang dibingkai dengan nilai-nilai *ruhiyah*; b) membantu anak mengembangkan kecerdasan yang optimal dalam aspek kognitif, emosional dan spiritual (*multiple intelligences*); c) membantu anak mencapai keseimbangan fungsional otak kiri dan otak kanan yang dibingkai dengan nilai-nilai *ruhiyah* dan d) menguasai *life skill* (kecakapan hidup) yang meliputi *problem solving*, komunikasi yang efektif, mudah beradaptasi, mampu menghadapi tantangan dan berani mengambil resiko (Ratna Megawangi. Diakses pada 19 Maret 2011 dari http://ihf-sbb.org/tk_karakter.htm).

diri sendiri, keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pendidikannya (Koesoema, 2010).

Dalam konteks ini, pendidikan karakter yang diterapkan dalam lembaga pendidikan kita bisa menjadi salah satu sarana pembudayaan dan pemanusiaan. Kita ingin menciptakan sebuah lingkungan hidup yang menghargai hidup manusia, menghargai keutuhan dan keunikan ciptaan, serta menghasilkan sosok pribadi yang memiliki kemampuan intelektual dan moral yang seimbang sehingga masyarakat akan menjadi semakin manusiawi (Koesoema, 2010).

Pendidikan karakter melalui sekolah, tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan, tapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan (*prizing*) kepada yang berprestasi, dan hukuman kepada yang melanggar (*punishment*), menumbuhkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mencegah (*discowaging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk. Selanjutnya menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*characterbase education*) dengan menerapkan ke dalam setiap pelajaran yang ada, di samping mata pelajaran khusus untuk mendidik karakter, seperti pelajaran Agama; Sejarah; Moral Pancasila dan sebagainya (Abdul Aziz, 2011).

Meskipun sekolah memiliki tanggung jawab atas pemberian pendidikan karakter yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam sekolah, namun orang tua dan masyarakat di lingkungan anak juga turut

terlibat dan bertanggung jawab atas pembentukan karakter anak. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Baik dalam pendidikan di rumah maupun di sekolah, orang tua dan guru tetap sadar bahwa pembangunan tabiat (watak) yang agung adalah tugas mererka (Hidayatullah, 2009).

5. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter

Adapun prinsip-prinsip dasar pendidikan karakter di sekolah (Koesoema, 2010) antara lain: a) Karaktermu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan atau kamu yakini; b) Setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang macam apa dirimu; c) Karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, bahkan seandainya pun kamu harus membayarnya secara mahal sebab mengandung risiko; d) Jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain sebagai patokan bagi dirimu. Kamu dapat memilih patokan yang lebih baik dari mereka; e) Apa yang kamu lakukan itu memiliki makna dan transformatif. Seorang individu bisa mengubah dunia dan f) Bayaran bagi mereka yang memiliki karakter baik adalah bahwa kamu menjadi pribadi yang lebih baik, dan ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni.

Sedangkan *Character Education Quality Standards* (Kunci Pendidikan Karakter, 2009. Diakses pada 21 juni 2011 dari <http://karakterbangkit.blogspot.com/2009/03/kunci-sukses-pendidikan-karakter.html>) telah merekomendasikan 11 prinsip untuk mewujudkan

Persepsi adalah kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan yang meliputi mengelompokkan, membeda-bedakan atau memfokuskan obyek-obyek yang ditangkap melalui alat-alat indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga obyek tersebut dapat diamati (Sarwono, 1991).

Dari beberapa definisi di atas, maka persepsi dapat diartikan sebagai proses mengetahui sesuatu dari rangsangan yang diterima melalui alat indera untuk dapat disadari, diamati dan diinterpretasi.

Ciri-ciri umum dunia persepsi (Irwanto, 2002) antara lain: a) Rangsang yang diterima oleh individu harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera. Modalitas merupakan sifat sensoris dasar dari tiap-tiap indera seperti cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran dan sifat permukaan bagi peraba; b) Dunia persepsi mempunyai dimensi ruang yang meliputi atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit dan latar depan-latar belakang; c) Dunia persepsi memiliki dimensi waktu seperti cepat-lambat dan tua-muda; d) obyek atau gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya yang merupakan keseluruhan yang menyatu, seperti suatu benda tidak berdiri sendiri melainkan dalam ruang tertentu, pada saat tertentu dan pada letak atau posisi tertentu pula dan e) Dunia persepsi adalah dunia penuh arti. Persepsi atau pengamatan cenderung pada gejala-gejala yang mempunyai makna atau yang berhubungan dengan tujuan dalam individu.

Menurut Pareek dan Milton (dalam Arisandy, 2004), persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu proses penerimaan, pemilihan, pengorganisasian, serta pemberian arti terhadap rangsang yang diterima. Namun demikian pada proses tersebut tidak hanya sampai pada pemberian arti saja tetapi sekaligus mempengaruhi pada perilaku yang akan dipilih sesuai dengan rangsang yang diterima dari lingkungan. Proses persepsi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Penerimaan rangsang: Pada proses ini, individu menerima rangsangan dari berbagai sumber. Seseorang lebih senang memperhatikan salah satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya, apabila sumber tersebut mempunyai kedudukan yang lebih dekat atau lebih menarik baginya; b) Proses menyeleksi rangsang: Setelah rangsang diterima kemudian diseleksi dan mulailah proses perhatian. Stimulus tersebut diseleksi untuk kemudian diproses lebih lanjut. c) Proses pengorganisasian: Rangsang yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk yang dimengerti; d) Proses penafsiran: Setelah rangsangan atau data diterima dan diatur, individu akan menafsirkan data tersebut dengan berbagai cara. Setelah data tersebut ditafsirkan, maka telah dapat dikatakan sudah terjadi persepsi karena persepsi pada dasarnya adalah memberikan arti kepada berbagai informasi yang diterima; e) Proses pengecekan: Setelah data ditafsirkan, maka individu akan mengambil beberapa tindakan untuk mengecek apakah yang dilakukan benar atau salah. Penafsiran ini dapat dilakuakn dari waktu ke waktu untuk menegaskan apakah penafsiran atau persepsi dibenarkan atau

sesuai dengan hasil proses selanjutnya dan f) Proses reaksi: individu kemudian akan menunjukkan tindakan-tindakan dalam merespon hasil persepsinya. tindakan-tindakan dalam reaksi tersebut biasanya tersembunyi atau terbuka.

Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu: a) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit; b) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana dan c) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi (Soelaeman, 1987 dalam Sobur, 2003).

Sedangkan perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbuat kelakuan perbuatan, dan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan. (Poerwadarminto, 1982). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan (Depdiknas, 2005). Perilaku merupakan respon dari hasil tanggapan atas berbagai stimulus yang telah dipersepsikan.

Sedangkan ciri-ciri perilaku (Irwanto, 2002) antara lain: a) perilaku terkadang kasat mata, penyebabnya mungkin tidak dapat diamati secara langsung; b) perilaku mengenal berbagai tingkatan yaitu perilaku sederhana, stereotip dan perilaku kompleks dan 3) perilaku bervariasi menurut jenis-jenis tertentu yang bias diklasifikasikan diantaranya adalah perilaku kognitif atau rasional, perilaku afektif atau emosional dan perilaku psikomotorik atau gerak fisik.

Skinner (dalam Hermawan, 2007) membedakan perilaku menjadi dua, yaitu: a) perilaku yang alami (*innate behaviour*), yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan yang berupa refleks-refleks dan insting-insting; b) perilaku operan (*operant behaviour*) yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Pada manusia, perilaku operan atau psikologis inilah yang dominan. Sebagian besar perilaku manusia merupakan perilaku yang dibentuk, perilaku yang diperoleh, perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak (kognitif).

Ganjar (dalam Hermawan, 2007) mengemukakan bahwa timbulnya perilaku yang dapat diamati merupakan resultan dari tiga daya pada diri seseorang, yakni : a) daya seseorang yang cenderung untuk mengulangi pengalaman yang enak dan cenderung untuk menghindari pengalaman yang tidak enak (disebut *conditioning* dari Pavlov, dan *Fragmatisme* dari James); b) daya rangsangan (stimulasi) terhadap seseorang yang ditanggapi, dikenal dengan "*stimulus-respons theory*" dari

Dari beberapa definisi di atas maka dapat diambil satu pengertian kejujuran yaitu perkataan atau perbuatan yang didasari kemurnian hati, sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, atau kebiasaan yang menyerukan kebenaran dan mengatakan fakta yang sebenarnya.

3. Teori yang Berkaitan dengan Kejujuran

Teori fungsional Katz menyatakan bahwa untuk memahami sikap menerima dan menolak perubahan haruslah berangkat dari dasar motivasional sikap itu sendiri. Yang dimaksud dengan dasar motivasional adalah fungsi sikap individu. Diantara beberapa fungsi tersebut adalah fungsi pernyataan nilai yang kejujuran termasuk salah satu nilai instrumental, yaitu preferensi atau pilihan mengenai berbagai perilaku dan sifat pribadi (Azwar, 2002).

Aronson (dalam Mazar et al, 2008) menyatakan *theory of self-concept maintenance* atau teori pemeliharaan konsep diri menyatakan bahwa orang sering terpecah antara dua motivasi bersaing, yaitu memperoleh keuntungan dari menipu (kecurangan/ketidajujuran) versus mempertahankan konsep diri yang positif sebagai individu yang jujur (kejujuran). Ketidajujuran (*dishonesty*) digambarkan pada pemerolehan keuntungan finansial dengan mengorbankan konsep diri yang jujur. Sebaliknya, orang yang jujur (*honesty*) dengan mempertahankan konsep dirinya akan melupakan keuntungan finansial.

Teori filsafat Thomas Hobbes dan Adam Smith serta teori standar ekonomi model perilaku manusia yang rasional dan egois (*homo*

economicus) adalah keyakinan bahwa orang yang berbuat tidak jujur secara sadar dan sengaja menukarkan atau menjual manfaat eksternal yang diharapkan dan biaya dari tindakan tidak jujur (Becker et.al dalam Mazar et.al, 2008). Menurut perspektif ekonomi tersebut, seseorang akan mempertimbangkan tiga aspek ketika dia melakukan tindakan tidak jujur, yaitu: a) besar keuntungan yang akan didapat; b) kemungkinan tertangkap atau ketahuan orang lain dan c) hukuman yang akan diterima jika tertangkap.

Menurut perspektif psikologis, selain pertimbangan keuangan (*financial*), keputusan untuk berlaku jujur atau tidak jujur adalah didasarkan pada penghargaan internal (*internal rewards*). Sebagai bagian dari sosialisasi, seseorang akan menginternalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat yang berfungsi sebagai tolok ukur internal dimana seseorang membandingkan perilakunya. Kepatuhan terhadap sistem nilai internal akan memberikan manfaat positif sedangkan ketidakpatuhan menyebabkan *negative reward* atau hukuman (Mazar et. al, 2008).

Dalam pengetahuan etika dasar disebutkan bahwa kejujuran merupakan dasar setiap usaha untuk menjadi orang yang kuat secara moral. Orang yang tidak jujur selalu berada dalam pelarian, pelarian dari orang lain yang ditakuti sebagai ancaman dan pelarian dari diri sendiri karena tidak berani menghadapi kenyataan yang ada (Magnis & Suseno, 1989).

2. Tujuan Kantin Kejujuran

Filosofi dari kantin kejujuran adalah menciptakan lingkungan yang mengkondisikan setiap pelaku yang ada di dalamnya untuk bersikap terbuka dan saling mempercayai satu sama lain. Apabila salah satu individu berperilaku tidak jujur, maka seluruh lingkungan akan merasakan akibat yang sama (Utomo, 2009).

Kantin kejujuran bertujuan untuk mengaplikasikan pendidikan karakter yang tengah didengungkan oleh praktisi pendidikan di Indonesia. Salah satu sarana yang dapat membantu membangun moral bangsa adalah melalui kantin kejujuran dengan membiasakan bersikap jujur dalam perbuatan yang dalam hal ini adalah transaksi jual beli.

Dengan adanya kantin kejujuran diharapkan anak akan dapat menghayati nilai kejujuran dalam hidup. Kantin kejujuran juga bertujuan sebagai bantuan sosial untuk mengembangkan nilai keutamaan pribadi di sekolah maupun lembaga lain walaupun pada kenyataannya kantin kejujuran menarik keinginan untuk mencuri atau berbuat tidak jujur karena tidak ada penjaga di kantin kejujuran (Koesoema, 2010).

D. Perkembangan Moral Individu

1. Perkembangan Moral Kohlberg

Ada tiga level dan enam tahap perkembangan moral menurut Kohlberg (dalam Santrock, 2008), yaitu: a) Penalaran konvensional (*preconventional reasoning*) adalah level terbawah. Pada level ini, anak tidak menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral

dikontrol oleh hukuman dan ganjaran eksternal. Pada level ini terdapat dua tahap yaitu: 1) *heteronomous morality*, yaitu anak patuh karena orang dewasa menyuruh mereka untuk patuh. Orang mendasarkan keputusan moralnya karena takut pada hukuman; 2) *individualism*, tujuan dan pertukaran, yaitu individu mengejar kepentingannya sendiri, tetapi membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Segala sesuatu yang benar melibatkan pertukaran yang seimbang; b) Penalaran konvensional (*conventional reasoning*) merupakan tahap kedua atau tahap menengah. Pada level ini, internalisasi masih setengah-setengah (*intermediate*). Anak akan patuh secara internal pada standar tertentu, tetapi standar tersebut pada dasarnya ditetapkan oleh orang lain seperti orang tua, guru, atau aturan sosial. Pada level terdapat dua tahap yaitu : 3) ekspektasi *interpersonal mutual*, hubungan dan konformitas interpersonal, yaitu individu menggunakan rasa percaya, perhatian dan loyalitas kepada orang lain sebagai basis untuk penilaian moral; 4) moralitas sistem sosial, yaitu penilaian moral didasarkan pada pemahaman dan aturan sosial, hukum, keadilan dan kewajiban dan c) Penalaran pos-konvensional (*postconventional reasoning*), yaitu level tertinggi dalam teori Kohlberg. Pada level ini moralitas telah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar eksternal. Murid mengetahui aturan-aturan moral alternatif, mengeksplorasi opsi dan kemudian memutuskan sendiri kode moral apa yang terbaik bagi dirinya. Pada level ini juga terdapat dua tahap perkembangan, yaitu: 5) kontrak sosial atau utilitas dan hak individual,

Hukuman dikenakan melalui medium sosial dan terjadi hanya jika ada orang lain yang menyaksikan pelanggaran, bahkan hukuman itu bisa dihindari;

2) Teori filsafat Thomas Hobbes dan Adam Smith dan teori standar ekonomi model perilaku manusia yang rasional dan egois (*homo economicus*) yang menyatakan bahwa orang yang berbuat tidak jujur secara sadar dan sengaja menukarkan atau menjual manfaat eksternal yang diharapkan dan biaya dari tindakan tidak jujur. Menurut perspektif ekonomi tersebut, seseorang akan mempertimbangkan tiga aspek ketika dia melakukan tindakan tidak jujur yaitu: a) besar keuntungan yang akan didapat; b) kemungkinan tertangkap atau diketahui orang lain dan c) hukuman yang akan diterima jika tertangkap.

3) Teori pemeliharaan konsep diri (*theory of self-concept maintenance*) Aronson (1969), yaitu pada dasarnya, seseorang sering terpecah antara dua motivasi bersaing, yaitu memperoleh keuntungan dari menipu (ketidakjujuran) versus mempertahankan konsep diri yang positif sebagai individu yang jujur (kejujuran). Ketidakjujuran (*dishonesty*) digambarkan dalam pemerolehan keuntungan finansial dengan mengorbankan konsep diri yang jujur. Sebaliknya, orang yang jujur (*honesty*) dengan mempertahankan konsep dirinya akan melupakan keuntungan finansial.

yang terdiri dari petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman dan kasus sejarah.

Sedangkan menurut Sitorus (dalam Agusta, 2003), data kualitatif berbentuk uraian rinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita terbuka (*open-ended narrative*) yang merupakan perkataan subyek dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang diceritakan secara mendalam menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial subyek sendiri. Oleh karena itu, peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri.

Data dalam penelitian ini berupa informasi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan. Data tersebut berupa catatan hasil observasi, catatan hasil wawancara dan catatan laporan kantin kejujuran serta gambar lokasi dan aktifitas di kantin kejujuran. Data hasil observasi dan wawancara tersebut bersifat deskriptif atau berbentuk narasi.

Data tersebut diperoleh dari beberapa informan atau subyek penelitian yang ditentukan dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Informan dalam penelitian ini terdiri dari guru dan siswa yang menjadi pengelola dan pembeli di kantin kejujuran. Masing-masing dari mereka secara tidak langsung terlibat dengan aktifitas di kantin kejujuran dan memiliki persepsi yang berbeda atau bahkan sama mengenai fokus masalah yang ingin peneliti ketahui.

(dalam Poerwandari, 2005), wawancara informal merupakan proses wawancara yang didasarkan pada perkembangan pertanyaan-pertanyaan secara spontan dan alamiah. Tipe wawancara ini umumnya dilakukan oleh peneliti dalam observasi partisipatif. Dalam situasi demikian, mungkin subyek tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai secara sistematis untuk menggali data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang sebagian besar berbentuk surat, catatan harian atau laporan. Sifat utama data dokumentasi tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga peneliti dapat mengetahui dan memakai informasi tentang data di masa lampau (Bungin, 2007). Dalam hal ini, peneliti memperoleh data hasil dokumentasi berupa gambar dan laporan kantin kejujuran.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman (Sugiyono, 2009) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: a) *data reduction* (reduksi data), yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan selanjutnya mencari tema dan polanya; b) *data display* (penyajian data) yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart*, pictogram atau gambar. Melalui penyajian data ini, data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga data akan semakin mudah difahami; c) *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila terdapat bukti-bukti baru. Namun jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan temuan atau data dilakukan peneliti dengan teknik triangulasi data. Triangulasi (Moleong, 2009) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Data yang terkumpul dari berbagai cara pengumpulan dibandingkan satu sama lain.

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik seperti: 1) peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipan untuk pengumpulan data 2) dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara catatan hasil wawancara dengan catatan hasil observasi 3) hasil konfirmasi tersebut diuji lagi dengan informasi sebelumnya karena bisa jadi konfirmasi tersebut bertentangan dengan informasi yang dihimpun sebelumnya (Moleong, 2009).

2. Sejarah

Pada awal berdirinya, SMA negeri 3 Sidoarjo merupakan lembaga khusus yang didirikan oleh swadaya murni masyarakat Sidoarjo. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1953 resmi berdiri lembaga sekolah dengan 4 (empat) kelas yang dipimpin oleh Bapak Suryo Daminhuri sampai dengan tanggal 31 Agustus 1959.

Kemudian di tanah peninggalan Belanda dengan area 3400 meter persegi ini resmi berdiri lembaga yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat dengan 6 lokal rombongan belajar dengan surat Mendikbud nomor 39/SK/III tanggal 1 September 1959 dipimpin oleh Adi Atmojo, kelas ditambah 1 jurusan sekolah A (SGTK) 4 tahun. Upaya pembenahan manajemen terus ditingkatkan dengan penambahan guru serta memberikan keterampilan pada TU sehingga kelas lokal bertambah menjadi 10 kelas. Pada tanggal 1 juli 1964 SGA/SGB beralih fungsi menjadi SPG dengan SK Mendikbud tanggal 21 Juli 1964 nomor 70-54.

Berdasarkan SK Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 3 Juli 1984 No. 6041/104.3.1/6.3.84 sebagai acuan penunjukan kepala sekolah dipegang oleh Bapak Soemardjo. SPG kemudian beralih fungsi menjadi SMA yang diawali pada tahun 1989-1990 dengan SK mendikbud RI tertanggal 5 Juni 1989 No. 0342/V/1989 sehingga lembaga ini berjalan bersama.

Pada tanggal 1 Januari 1966 terjadi pergantian kepala sekolah yang dijabat oleh Bapak Eddy Sarwono Sastrowardoyo, BA. Sampai dengan

tahun 1992 dengan 15 rombongan belajar dengan 10 kelas. Merujuk SK Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1992 No. 10045/04/C/1992 /SK, diadakan serah terima kepada kepala sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo Drs. H. Sholeh Anwar pada tanggal 14 September 1992 yang memimpin sampai bulan september 1996. Karena Drs. H. Sholeh Anwar diangkat menjadi pengawas di Kabupaten Lamongan.

Pada tanggal 1 Oktober 1996 terjadi serah terima Jabatan berdasar SK Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur No. 20263/164/C/1996 kepada Kepala Sekolah yang baru diangkat, yaitu Dra. Endang Untariningsih, M.Pd. yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surabaya.

SMA Negeri 3 Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Sultan Agung No. 09 Sidoarjo dengan jumlah 10 kelas dan 15 rombongan belajar dengan status tanah yang terkena garis sempadan dan kondisi gedung sudah tua, ternyata sulit berkembang. Apalagi sebuah kelas sempat dirobohkan karena sudah membahayakan, sedangkan renovasi kelas dan gedung yang dilakukan tidak memadai dalam hal pendanaan.

SMA Negeri 3 Sidoarjo kemudian mengadakan koordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Win Hendarso, M.Si. dan Bapak Drs. Ec. Salam serta pihak Depdikbud Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak Bambang Sudarsono Singgih. Hasil Koordinasi tersebut adalah dikeluarkannya SK Bupati Sidoarjo No. 119/890/40405/2000. Menurut SK tersebut, maka pada tanggal 3 Oktober 2000, SMA Negeri 3 Sidoarjo yang

terinspirasi dialog antara DPR dan KPK tentang Indonesia masa depan terkait pemberantasan korupsi yang selama ini hanya sebagai slogan, formalitas dan seremonial saja. Solusinya dimulai dari generasi muda yaitu memasukkan pendidikan antikorupsi melalui kurikulum.

Kemudian dia berpikir untuk merealisasikannya dengan mendirikan kantin kejujuran sebagai sarana untuk belajar berperilaku jujur dalam transaksi, juga dengan disiplin saat KBM berlangsung dengan tidak mencontek, setelah mengusulkan kepada pihak sekolah di dalam rapat. Kepala sekolah menerima usulan tersebut dan merespon. Setelah itu proposal dibuat dengan memotivasi kelas untuk membuat proposal kantin kejujuran sebagai tugas kelompok. Setiap kelompok terdiri dari delapan siswa. Kelompok dengan proposal terbaik maka kelasnya akan terpilih menjadi pengurus kantin kejujuran.

Kantin kejujuran diharapkan mampu menjadi sarana menanamkan dan membiasakan siapa saja untuk berbuat jujur dimulai dari diri sendiri. Kejujuran tidak lagi cukup dibina dan diberikan dalam materi pelajaran dan keteladanan, akan tetapi melalui praktek secara langsung dan pembiasaan yang salah satunya melalui transaksi di kantin kejujuran yang ada di SMA Negeri 3 Sidoarjo.

“Kantin kejujuran tu tempat untuk belajar jujur saat membeli, kan ga ada pengawasnya, dulu sempat ada usulan untuk dipasang CCTV tapi ga jadi soalnya kalo dipasang CCTV kan bukan Kujur namanya, kan tetep ada yang ngawasi” (3.3.8)

Pada perkembangan awal, kantin kejujuran dikelola dengan sangat baik oleh pengurus yang terdiri dari guru dan siswa sehingga kantin kejujuran aktif menjajakan barang dagangan yang berupa makanan dan minuman. Keuntungan pun sering didapatkan dan hanya sedikit kerugian yang dialami.

Namun keadaan demikian tidak bertahan sampai saat ini. Kini kantin kejujuran hampir mati seperti yang diungkapkan salah satu informan (PS) yang mengatakan:

“Ya secara singkat hidup mati-hidup mati. Sekarang kelihatannya sudah mati, hidupnya tidak maksimal” (1.1.8)

Informan lain (R) yang juga pernah menjadi pengurus kantin kejujuran menyatakan perkembangan kantin yang tidak seramai dulu:

“Sekarang bukanya pas ada kunjungan saja, sudah hampir ga pernah buka padahal dulu rame, dua etalase juga penuh, sekarang cuma satu yang dipake. Sekarang yang beli di kujur cuma anak kelas sekitar etalase aja” (9.1.1)

Kantin kejujuran sering tutup dan hanya buka jika ada kunjungan saja. Penyebabnya antara lain kurangnya keseriusan pengurus dalam mengelola kantin kejujuran, baik koordinasi maupun dorongan untuk membuka kantin kejujuran. Selain itu pengurus juga enggan untuk membuka kantin kejujuran padahal sudah sering diimbau oleh pembina.

pengalaman (*interpretation of experience*) dan bukan sekedar penginderaan. (Irwanto, 2002).

Persepsi dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978, dalam Sobur, 2003).

Persepsi warga sekolah mengenai kantin kejujuran meliputi pengetahuan tentang kegunaan kantin sebagai sarana jual beli sekaligus sebagai sarana untuk membiasakan berlaku jujur saat bertransaksi. Mereka juga mengetahui dan memahami beberapa hal yang berkaitan dengan kantin kejujuran antara lain kepengurusan, pemanfaatan fasilitas, keadaan untung-rugi dan proses transaksi di kantin kejujuran.

Begitu pula persepsi tentang makna kejujuran, warga sekolah beragam dalam memahami dan mengartikan kejujuran. Persepsi tersebut berbeda-beda karena pengalaman yang mendasari masing-masing informan ketika menanggapi dan menafsirkan kata kejujuran juga berbeda, diantaranya kejujuran merupakan lawan dari tidak bohong; kejujuran adalah hal kecil yang tidak mudah dilakukan dan kejujuran adalah kunci kesuksesan.

Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama , yaitu: a) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit; b) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti

merosotnya kecerdasan personal sebagaimana yang diungkapkan Imron Arifin (2011) bahwa kemerosotan kecerdasan bangsa Indonesia dewasa ini antara lain: a) Kemerosotan kecerdasan sosial, yaitu kecenderungan hilang perilaku sopan santun, empati, kooperasi; b) Kemerosotan kecerdasan emosional, yaitu munculnya sikap impulsif, egois, kurang mampu mengendalikan diri; c) Kemerosotan kecerdasan personal, yaitu mengendurnya keteguhan hati, ketekunan, kejujuran, sikap keingintahuan, disiplin pribadi, motivasi dan sikap positif; d) Kemerosotan kecerdasan kewarganegaraan berupa sikap acuh, mau menang sendiri dan benar sendiri, budaya plagiasi, korupsi dan serobot hak orang lain; e) Kemerosotan kecerdasan spiritual seperti kenyataan bahwa pendidikan agama kurang mampu mengubah perilaku spiritual seseorang.

Jika nilai kejujuran luntur atau bahkan hilang dalam suatu bangsa, maka bangsa akan mengalami kehancuran yang mungkin tidak dirasakan oleh para pelaku kecurangan. Dan jika budaya tidak jujur baik dalam bertransaksi maupun ketika ulangan berlangsung terus dibiarkan, maka hal tersebut menjadi tanda bangsa ini akan segera hancur.

Lickona (dalam Arifin, 2011) mengemukakan sepuluh tanda-tanda zaman sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, yaitu: a) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; b) Membudayanya ketidakjujuran; c) Sikap fanatik terhadap kelompok (*peer group*); d) Rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; e) Semakin kaburnya moral baik dan buruk; f) Penggunaan bahasa yang memburuk; g)

Meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; h) Rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga Negara; i) Menurunnya etos kerja dan adanya rasa saling curiga dan j) Kurangnya kepedulian di antara sesama.

Salah satu tanda kehancuran bangsa adalah membudayanya ketidakjujuran. Oleh karena itu, nilai kejujuran sebagai karakter bangsa perlu ditanamkan kepada semua elemen masyarakat sedini mungkin. Penanaman nilai kejujuran tidak hanya dilakukan dengan memahamkan orang tentang makna kejujuran, akan tetapi kejujuran juga harus difahamkan dengan cara aplikasi yang nyata dalam kehidupan, baik di dalam perkataan maupun perbuatan.

